

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Kie, Tan Thong, 1994, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Koesnardi, Moh. dan Saragih, Bintan R., 1985, *Ilmu Negara*, Penerbit Gaya Media Pertama, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (edisi Revisi)*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- _____, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Samudera, Teguh, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Sihotang, Kasdin; Rima, Febiana; Molan, Benyamin; Ujan, Andre Ata; Ristyantoro, Rodemeous; Jena, Yeremias, 2012, *Critical Thinking (Membangun Pemikiran Logis)*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Smith, K.M. Rhona; Høstmælingen, Njäl; Ranheim, Christian; Arinanto, Satya; Falaakh Fajrul; Soeprapto, Enny; Kasim, Ifdhal; Rizky, Rudi M.; Marzuki, Suparman; Agus, Fadillah; Yudhawiranata, Agung; Sudjatmoko, Andrey; Pradjasto, Antonio; Eddyono, Sri Wiyanti; Riyadi, Eko, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, PT Kanisius, Yogyakarta.

Subekti, R., 1977, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Binacipta, Bandung.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suyanto, 2020, *Hapusnya Hak atas Tanah akibat Penitipan ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah*, CV. Jakad Publishing, Surabaya.

Tjandra, W. Riawan, 2015, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

Abidin, Zainal, "HAM: Sebuah Pengantar", *tulisan disampaikan pada Pelatihan Teknik Advokasi untuk Advokat Bantuan Hukum* pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 21 April 2014.

Adlhiyati, Zakki dan Achmad, 2019, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2019, diakses dari: <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102>, pada tanggal 30 Juli 2020.

Asrun, A. Muhammad, "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum (Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi)", *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Faiz, Pan Mohammad, 2009, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009, diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573, pada tanggal 27 Juli 2020.

Fattah, Damanhuri, 2013, "Teori Keadilan menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Volume 9, Nomor 2, Juli-Desember 2013, diakses dari <http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/viewFile/1589/1324>, pada tanggal 27 Juli 2020.

Helmi, Muhammad, 2015, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XIV, Nomor 2, Desember 2015, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/57820-ID-konsep-keadilan-dalam-filsafat-hukum-dan.pdf>, pada tanggal 13 September 2020.

- Kusniati, Retno, “Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *makalah*, disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Hotel Ceria, Jambi, 24 Mei 2011.
- Laili, Fardatul, 2015, “Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Didasarkan pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/861>, pada tanggal 31 Juli 2020.
- Nurhardianto, Fajar, “Politik Hukum HAM di Indonesia”, *Jurnal TAPIS*, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2014.
- Purwanto, 2017, “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/265442-perwujudan-keadilan-dan-keadilan-sosial-b6aa6e8f.pdf>, pada tanggal 27 Juli 2020.
- Rakhman, Muhammad Arif, “Surat Keterangan Waris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.
- Susilo, Agus Budi, 2015, “Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*The Meaning and Criteria of Discretion of Public Policy and/or Act of Public Officials in Good Governance Implementation*)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 1, 2015, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/317562267_Makna_dan_Kriteria_Diskresi_Keputusan_DanAtau_Tindakan_Pejabat_Publik_dalam_Mewujudkan_Tata_Pemerintahan_yang_Baik, pada tanggal 28 Oktober 2020.
- Talib, Adilah Novel, “Pluralisme Peraturan Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Peralihan Hak atas Tanah di Jakarta Timur”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.
- Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Mei 2014, diakses dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291>, pada tanggal 27 Juli 2020.
- Wirawan, Vani, “Praktek Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Rechts cadaster) Warga Negara Indonesia Asli karena Peristiwa Pewarisan yang Mempengaruhi Pemasukan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman”, *Tesis*,

Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.

Yoga, I Gusti Kade Prabawa Maha, dkk., 2018, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK)*, Volume 2, Nomor 2, diakses dari <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7817>, pada tanggal 9 September 2020.

Yumni, Lalitya Amalina Zata, “Surat Keterangan Waris yang Ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

D. Internet

Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota Jakarta, “Sejarah Balai Harta Peninggalan Jakarta”,

<https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal 31 Juli 2020.

Balai Harta Peninggalan Semarang, “Surat Keterangan Hak Waris”, <https://www.bhpsemarang.com/statis-6-suratketeranganhakwaris.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2020.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan: “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Profil dan Perkembangan Hukum Balai Harta Peninggalan”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2113_Profil%20dan%20Perkembangan%20Hukum%20BHP.pdf, diakses pada tanggal 31 Juli 2020.

Balai Harta Peninggalan Semarang, “*Checklist* Permohonan Surat Keterangan Hak Waris”, <https://www.bhpsemarang.com/downlot.php?file=CHECKLIST%20PERM OHONAN%20SKHW.docx>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2020.